



Implikasi Konflik Laut Tiongkok Selatan: Analisis Perspektif *Critical Security Studies* terhadap Keamanan Masyarakat Pesisir Filipina

Melani Pratiwi Palajukan¹, Imam Fadhil Nugraha²

¹⁻²Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan km. 10 Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: melanipratiwi20@gmail.com

Abstract. *This study examines the implications of the South China Sea maritime dispute on the security of coastal communities in the Philippines. Amidst the dominance of traditional security understandings oriented toward state sovereignty and military power competition, this study offers an alternative perspective that focuses on human security, particularly for community groups directly affected by the dynamics of this conflict. The escalation of the dispute creates a security paradox in which state-centered security measures tend to prioritize territorial defense while neglecting the protection of civilians in social, economic, and livelihood aspects. This study employs a Critical Security Studies framework and uses a descriptive qualitative method based on a case study of the Philippine territorial dispute in the South China Sea. Data were collected through a review of academic literature, policy documents, and relevant reports concerning regional security and community welfare. The findings indicate that the ongoing conflict not only affects geopolitical stability and interstate relations but also has significant consequences for coastal communities, including declining fishing activities, economic insecurity, restricted access to marine resources, and increasing vulnerability to social and environmental challenges. Therefore, a human security approach is essential for understanding and addressing the broader impacts of maritime disputes on affected populations.*

Keywords: *China; Coastal Communities; Critical Security Studies; Human Security; South China Sea.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implikasi sengketa maritim Laut Cina Selatan terhadap keamanan masyarakat pesisir di Filipina. Di tengah dominasi pemahaman keamanan tradisional yang berorientasi pada kedaulatan negara dan persaingan kekuatan militer, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif yang berfokus pada keamanan manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara langsung terdampak oleh dinamika konflik tersebut. Eskalasi sengketa menciptakan paradoks keamanan, di mana langkah-langkah keamanan yang berpusat pada negara cenderung memprioritaskan pertahanan teritorial, tetapi mengabaikan perlindungan warga sipil dalam aspek sosial, ekonomi, dan mata pencaharian. Penelitian ini menggunakan kerangka Critical Security Studies dengan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada studi kasus sengketa teritorial Filipina di Laut Cina Selatan. Data dikumpulkan melalui kajian literatur akademik, dokumen kebijakan, dan berbagai laporan yang relevan mengenai keamanan regional serta kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terus berlangsung tidak hanya memengaruhi stabilitas geopolitik dan hubungan antarnegara, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat pesisir, seperti menurunnya aktivitas perikanan, ketidakamanan ekonomi, terbatasnya akses terhadap sumber daya laut, serta meningkatnya kerentanan terhadap berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan manusia menjadi penting untuk memahami dan mengatasi dampak yang lebih luas dari sengketa maritim terhadap masyarakat yang terdampak.

Kata kunci: Cina; Keamanan Manusia; Komunitas Pesisir; Laut Cina Selatan; Studi Keamanan Kritis.

1. LATAR BELAKANG

Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah perairan strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, memisahkan daratan Asia Tenggara dengan pulau-pulau di sekitarnya, serta membentang dari Selat Taiwan hingga Selat Malaka dan selat Karimata (Jahangir, 2020). Sebagai wilayah strategis, perairan ini menyimpan cadangan kekayaan

sumber daya alam, mencakup perikanan, minyak bumi, dan gas alam. Namun, konflik sengketa wilayah membuat potensi sumber daya di perairan ini belum dapat tereksplorasi sepenuhnya. Realitanya, perairan ini dikenal akan dinamika geopolitik dengan berbagai negara.

Konflik sengketa wilayah yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa maritim kompleks yang melibatkan klaim tumpang tindih antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Indonesia. Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah tersebut melalui garis demarkasi sepihak yakni *Nine Dash Line* (sembilan garis putus-putus) (Susanti, 2025). UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 telah menetapkan batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) setiap negara untuk memiliki hak penuh atas eksploitasi sumber daya dan penerapan kebijakan maritim. Meski demikian, Tiongkok secara unilateral mengklaim hak historis maritim mereka seluas 2.000 km², yang didasarkan pada argumentasi bahwa hak tersebut telah eksis jauh sebelum ratifikasi UNCLOS 1982 (Adhi, 2021).



Gambar 1. *Nine-Dash Line* Laut Tiongkok Selatan (Sumber: (Maulana, 2016))

Salah satu negara yang paling terdampak oleh konflik geopolitik Laut Tiongkok Selatan adalah Filipina. Ketegangan bermula pada tahun 2012, ketika sebuah kapal nelayan Tiongkok terdeteksi beroperasi di sekitar Beting Scarborough, bagian dari Kepulauan Spratly. Namun, upaya penangkapan oleh Angkatan Laut Filipina terhadap kapal tersebut mengalami kegagalan akibat intervensi dari kapal pengintai Tiongkok yang juga berada di perairan yang sama (Zebua & Shiddiqy, 2025, hal. 2). Pasca insiden Scarborough Shoal, komunitas nelayan Filipina di Laut Tiongkok Selatan kerap menghadapi berbagai hambatan yang berlangsung dalam waktu panjang. Diantaranya, dominasi kapal patroli Tiongkok serta pengambilalihan kontrol atas wilayah beting, yang secara langsung membatasi akses operasional nelayan lokal terhadap sumber daya laut.

Secara geografis, klaim *nine-dash line* Tiongkok di ZEE Filipina mencakup area Pulau Luzon di Masinloc hingga Pulau Palawan di selatan (Jennings, 2017). Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino III (2010-2016), membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase

Internasional di Den Haag, Belanda pada tahun 2013 (Damping & Windiani, 2020, hal. 3). Filipina menggunakan jalur hukum internasional untuk mempertegas legitimasi atas hak ZEE mereka. Strategi ini menjadi instrumen diplomatik guna menarik dukungan negara lain, serta menekan Tiongkok agar mematuhi UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum yang bersifat final (Nurcahyana & dkk., 2025, hal. 10).

Selama ini, Tiongkok dan Filipina kerap terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan di wilayah sengketa. Tiongkok secara agresif mengerahkan kapal patroli dan membangun pulau reklamasi sebagai bentuk klaim teritorialnya. Pulau reklamasi tersebut juga telah dilengkapi dengan fasilitas militer, di mana tindakan ini jelas memicu kecemasan geopolitik bagi negara-negara Asia Tenggara (Khairunnisa & Burhanuddin, 2025, hal. 2). Dalam upaya mempertahankan wilayah nasional, Filipina menjalin kerjasama dengan menerima dukungan militer dari Amerika Serikat melalui FONOPs (Freedom of Navigation Operations). Operasi ini melibatkan kapal-kapal perang angkatan laut AS yang berlayar secara rutin di sekitar wilayah ZEE Filipina. Hal ini bertujuan untuk menegaskan prinsip kebebasan navigasi berdasarkan hukum UNCLOS 1982 (Zebua & Shiddiqy, Peran Amerika Serikat Terhadap Filipina Dalam Konflik Laut Cina Selatan Pasca Putusan PCA (Permanent Court of Arbitration), 2025, hal. 4, 7-8).

Namun dibalik upaya pertahanan dan keamanan tersebut, ancaman nyata justru menysasar pada keamanan komunitas masyarakat pesisir Filipina. Kondisi ini turut diperrumit oleh arah kebijakan Presiden Rodrigo Duterte (2016-2022) yang melakukan pendekatan kooperatif dengan Tiongkok ketimbang memprioritaskan isu keamanan wilayah. Sikap tersebut dinilai memberikan ruang bagi Tiongkok untuk memperluas kontrolnya dan mengesampingkan kepentingan masyarakat nelayan Filipina itu sendiri (Arihito, 2017, hal. 10).

Kajian akademik mengenai konflik Laut Tiongkok Selatan selama ini didominasi oleh paradigma realisme dan keamanan tradisional yang menempatkan negara sebagai aktor utama pada kompetisi kekuatan dan kepentingan nasional. Misalnya, (Hidayat & dkk., 2024, hal. 10-11), melalui *Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik* menggunakan paradigma realisme untuk membedah konflik di Laut Tiongkok Selatan sebagai manifestasi murni dari perebutan kekuasaan (*power struggle*). Perilaku negara-negara pengklaim berusaha mengamankan kepentingan strategis dan pengaruh mereka melalui peningkatan kapabilitas militer dan aliansi, sebagai strategi untuk mengimbangi dominasi Tiongkok.

Sementara itu, (Dawam & Fatwa, 2025, hal. 14-15) pada *Dinamika Penyelesaian Perselisihan Internasional Studi Kasus Laut China Selatan* menitikberatkan realisme dalam kompleksitas penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Meskipun memaparkan berbagai mekanisme hukum, analisisnya menekankan bahwa implementasi putusan hukum internasional seringkali terhambat oleh kepentingan geopolitik dan ambisi negara. Negara bersikap kompetitif untuk memperebutkan klaim teritorial dan eksploitasi sumber daya dibandingkan patuh terhadap institusi hukum global. Adapun, (Moranta & Ras, 2022, hal. 3) dalam *Dinamika Laut Cina Selatan dalam Perspektif Dunia Internasional* secara spesifik menegaskan persaingan kekuatan negara dalam kompetisi militer untuk memastikan keamanan nasionalnya. Hasil analisisnya membahas mengenai ketidakberdayaan organisasi internasional dalam menghadapi tindakan negara yang memprioritaskan kekuatan fisik dibandingkan hukum internasional.

Dari hasil survei literatur tersebut, penulis melihat fokus analisis mengenai konflik ini menitikberatkan pada stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan adanya paradoks keamanan, di mana upaya negara untuk meningkatkan keamanan justru menciptakan ancaman baru bagi warga negara yang berada di wilayah terdampak. Meskipun berbagai kajian akademik telah membahas konflik Laut Tiongkok Selatan dari perspektif geopolitik, hukum internasional, dan keamanan tradisional, sebagian besar studi masih menempatkan negara sebagai unit analisis utama. Fokus tersebut menyebabkan pengalaman masyarakat pesisir sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh praktik keamanan negara belum memperoleh perhatian yang memadai.

Terdapat kecenderungan kuat bahwa dominasi negara dalam kasus sengketa wilayah justru mengabaikan krisis sosial-ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, studi-studi sebelumnya cenderung menjelaskan konflik sebagai persoalan perebutan pengaruh tanpa mengelaborasi bagaimana praktik keamanan negara justru dapat memproduksi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah penelitian dengan menganalisis adanya dekonstruksi terhadap konsep keamanan. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya dilindungi dan siapa yang justru terpinggirkan dalam praktik keamanan tersebut, serta bagaimana praktik keamanan negara ternyata menghasilkan berbagai bentuk insecurities terhadap masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Critical Security Studies

Talas *Critical security studies* (studi keamanan kritis) muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dominasi pemikiran keamanan tradisional (realisme) pasca perang dingin. Pemikiran ini mulai ada sejak awal 1980-an melalui kontribusi dua institusi, yakni Ken Booth dan Richard Wyn Jones dari *Aberystwyth School* di Inggris, serta Keith Krause dan Mike Williams dari *Toronto School* di Kanada. Sebenarnya, kemunculan pemikiran ini juga dipengaruhi oleh teori kritis *Frankfurt School* serta pemikiran Gramscian yang menekankan pada aspek perdamaian dan emansipasi. Menurut Booth, *critical security studies* didefinisikan sebagai perspektif yang mempertanyakan kembali makna dasar konsep keamanan itu sendiri, melalui tiga klaim ontologis, yaitu: apa yang nyata, apa itu pengetahuan, dan apa yang harus dilakukan? (Hidayat R. A., 2017, hal. 1-3, 10).

Lebih lanjut, *critical security studies* muncul untuk mengkritik pemikiran keamanan tradisional yang bersifat *state-centric* atau hanya berpusat pada aktor negara saja. Diantaranya, pertama, negara sebagai aktor seringkali menjadi bagian dari persoalan keamanan itu sendiri daripada menjadi penyedia keamanan bagi warga negaranya. Kedua, pemikiran keamanan tradisional mengabstraksikan isu keamanan hanya dalam lingkup ancaman militer serta perimbangan kekuatan antarnegara. Ketiga, *critical security studies* menolak gagasan yang menempatkan manusia sebagai subordinat dari kedaulatan negara (Hidayat R. A., Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara, 2017, hal. 8-9).

Dalam studi keamanan kritis, konsep emansipasi yang diusung oleh Ken Booth merupakan pilar utama dalam memahami keamanan. Merujuk pada karya Booth, "*Theory of World Security*" (2007), secara konseptual, emansipasi adalah upaya sistematis untuk membebaskan manusia, baik individu maupun kelompok dari segala bentuk keterbatasan, tekanan, dan penindasan yang menghalangi kebebasan mereka dalam menentukan pilihan hidup. Konsep ini diperkuat oleh gagasan Albert dan Carlsson (2009), mengenai penghapusan kekerasan personal dan struktural. Tujuannya adalah untuk mencapai kebebasan dari rasa takut akan kekerasan (*freedom of fear*), kebebasan dari masalah kemiskinan (*freedom of want*), dan mewujudkan pemberdayaan martabat manusia (*empowerment dignity*) (Hidayat R. A., Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara, 2017, hal. 12-13). Booth berargumen bahwa negara seringkali gagal menjadi penjamin keamanan jika hanya berfokus pada perang. Sebaliknya, keamanan harus difokuskan pada level manusia (*human security*) sebagai bentuk perlindungan dari ancaman nirmiliter.

Critical security studies melakukan restrukturisasi terhadap objek keamanan dengan memperluas cakupan keamanan menjadi *human-centric*. Pergeseran fokus ini berorientasi pada upaya menurunkan kemiskinan, menghilangkan tekanan politik, dan menjamin hak asasi manusia demi kesejahteraan individu secara menyeluruh (Apriliani & Rahmat, 2023, hal. 9-10). Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor negara berpotensi menimbulkan paradoks keamanan. Paradoks keamanan merujuk pada kondisi ketika langkah-langkah keamanan yang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas justru memicu bentuk ketidakamanan baru. Pada akhirnya, negara mengesampingkan dimensi keamanan manusia karena fokus utama telah tertuju pada kedaulatan wilayah.

Human Security

Secara formal, konsep *human security* (keamanan manusia) muncul dalam *Human Development Report* yang dirilis oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) tahun 1994. Pencetus utama konsep ini adalah Mahbub ul Haq melalui kolaborasi dengan UNDP. Namun, konsep ini telah digagas sejak pertemuan para akademisi dalam WOMP (*World Orders Models Project*) dan *the Club of Rome* pada 1960-an, serta diperkuat oleh berbagai komisi internasional pada tahun 1980-an, yang mulai menyoroti isu keamanan non-tradisional, seperti kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

UNDP mendefinisikan keamanan manusia pada dua aspek utama. Pertama, perlindungan dari ancaman kronis, seperti gangguan kesehatan dan kelaparan. Kedua, perlindungan dari ancaman secara tiba-tiba yang dapat membahayakan kehidupan sehari-hari, dalam konteks rutinitas sosial-ekonomi. *Commision on Human Security* kemudian memperluas definisi ini sebagai upaya melindungi inti kehidupan manusia, yang mencakup kebebasan dari ancaman yang meluas hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi, konsep keamanan manusia pada dasarnya menekankan pada martabat manusia, bukan cuma sekadar urusan keamanan negara (Kusuma, *Human Security Dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*, 2021, hal. 2-3). Dalam buku (Kusuma, *Human Security dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*, 2021, hal. 4), UNDP (1994) menyebutkan terdapat dua aspek utama dalam konsep keamanan manusia, yang diadopsinya dari pidato Sekretaris Amerika Serikat tahun 1945:

“The battle of peace has to be fought on two fronts. The first is the security front where victory spells freedom from fear. The second is the economic and social front where victory means freedom from want”

Pertama, *freedom from fear*, yakni melindungi individu dari ancaman fisik. Kedua, *freedom from want*, yakni menjamin perlindungan individu agar dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya. Lebih lanjut, komponen ketiga, yakni *freedom from indignity*, yang mempromosikan pemberdayaan kualitas hidup manusia.

Berangkat dari pemahaman keamanan tradisional yang bersifat *state-centric* dengan menjadikan negara sebagai aktor pusat, keamanan manusia mengalihkan fokus tersebut menjadi *human-centric* dengan menempatkan individu sebagai objek keamanan. Fokus utama menitikberatkan pada perlindungan fisik dan pemenuhan hak dasar individu. Sejalan dengan itu, UNDP telah mengkategorisasikan tujuh aspek yang membentuk keamanan manusia (Kusuma, *Human Security Dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*, 2021, hal. 5). Diantaranya:

- a. *Economic Security* (keamanan manusia) merujuk pada jaminan pendapatan dasar yang stabil bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengakses pekerjaan yang layak.
- b. *Food Security* (keamanan pangan) mengacu pada kepastian individu untuk memperoleh bahan pangan dasar serta ketersediaan nutrisi yang cukup.
- c. *Health Security* (keamanan kesehatan) berfokus pada perlindungan individu dari penyakit atau berbagai kondisi kesehatan buruk serta akses pelayanan medis yang merata.
- d. *Environmental Security* (keamanan lingkungan) berkaitan dengan upaya melindungi populasi manusia dari bahaya polusi, kerusakan ekosistem, serta bencana alam.
- e. *Personal Security* (keamanan personal) merujuk pada jaminan perlindungan individu dari ancaman kekerasan fisik, baik dari aktor negara maupun non-negara, yang berpotensi menyerang tingkat individu, kelompok rentan, kelompok masyarakat, dan negara (Wahyuni, 2021, hal. 5).
- f. *Community Security* (keamanan komunitas) berkaitan dengan perlindungan kelompok tertentu dari segala bentuk tindakan diskriminasi, konflik SARA, konflik bersenjata, atau perilaku marginalisasi.
- g. *Political Security* (keamanan politik) mengacu pada kondisi di mana warga negara terbebas dari segala bentuk represi politik.

Meskipun studi mengenai kasus Laut Tiongkok Selatan telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek keamanan tradisional. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap dimensi keamanan manusia. Padahal, dinamika konflik di Laut Tiongkok Selatan menunjukkan secara jelas bahwa praktik keamanan negara melalui militerisasi wilayah, patroli maritim, dan penguatan pertahanan justru menghasilkan bentuk insekuritas baru bagi masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya sistem paradoks, di mana upaya negara dalam bidang pertahanan dan keamanan wilayah tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan terhadap keamanan manusia.

Maka dari itu, penelitian ini mengintegrasikan *critical security studies* dan konsep keamanan manusia sebagai kerangka utama untuk menganalisis bagaimana praktik keamanan dan rivalitas geopolitik di Laut Tiongkok Selatan dikonstruksi melalui sekuritisasi wilayah dan kompetisi strategis antaraktor negara. Integrasi keduanya digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerentanan yang dialami oleh masyarakat pesisir sebagai subjek utama dalam konflik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis interpretatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implikasi konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap keamanan masyarakat pesisir di Filipina. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk mengkaji makna dan realitas sosial. Penelitian ini juga berupaya menginterpretasikan bagaimana praktik keamanan dalam konflik Laut Tiongkok Selatan dikonstruksi melalui rivalitas geopolitik, sekuritisasi wilayah, dan penguatan pertahanan antaraktor negara yang kemudian berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir Filipina.

Penulis menggunakan metode analisis interpretatif untuk menjelaskan bagaimana keamanan dikonstruksi secara sosial. Metode ini diterapkan karena selaras dengan kerangka perspektif *critical security studies*. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh (Wiesner, 2022, hal. 1), metode analisis interpretatif pada pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian bertujuan untuk memahami ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ suatu makna, narasi, dan argumen dikonstruksi dalam fenomena sosial. Di mana pada penelitian ini, metode analisis interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana dinamika konflik maritim dan praktik keamanan negara dapat menghasilkan bentuk-bentuk insecurities baru terhadap masyarakat sipil yang berada di wilayah terdampak konflik.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir Filipina sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh konflik sengketa maritim Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu, objek dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana implikasi konflik terhadap keamanan manusia, dengan memfokuskan pada aspek ancaman keamanan personal, aspek kerentanan ekonomi, serta aspek keterbatasan akses sumber pangan. Penentuan subjek dan objek tersebut didasarkan pada pendekatan *human security* yang menempatkan individu dan komunitas sebagai pusat analisis keamanan.

Data-data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan diperoleh melalui riset secara daring. Sumber data yang digunakan meliputi literatur akademik, laporan media kredibel, situs-situs internet resmi, data pergeseran kekuatan maritim di Scarborough Shoal tahun 2012 dari AMTI, data risiko ekonomi negara-negara di Asia Tenggara tahun 2023 pasca konflik Laut Tiongkok Selatan dari Stimson Center, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan konflik Laut Tiongkok Selatan. Teknik pengumpulan data ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan merupakan isu yang kompleks dan memiliki keterbatasan akses untuk penelitian lapangan, sehingga penggunaan data sekunder menjadi alternatif yang tepat.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni reduksi data, penyajian dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Tahap awal dimulai dengan identifikasi fenomena sosial dan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya, penulis mulai mengumpulkan berbagai sumber literatur sebagai data konkret. Data yang diperoleh kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek keamanan manusia yang telah ditentukan sebelumnya, yakni ancaman keamanan personal, kerentanan ekonomi, serta keterbatasan akses sumber pangan. Setelah itu, penulis kemudian mengidentifikasi pola-pola praktik keamanan untuk melihat bagaimana praktik tersebut menghasilkan insecurities bagi warga suatu negara. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi konflik terhadap keamanan manusia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui metode interpretatif, analisis dinamika Laut Tiongkok Selatan akan berfokus pada bagaimana realitas konflik tersebut dialami secara langsung oleh aktor non-negara yang paling rentan. Hasil penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi insecurities dan dibedah secara empiris untuk membuktikan adanya paradoks keamanan.

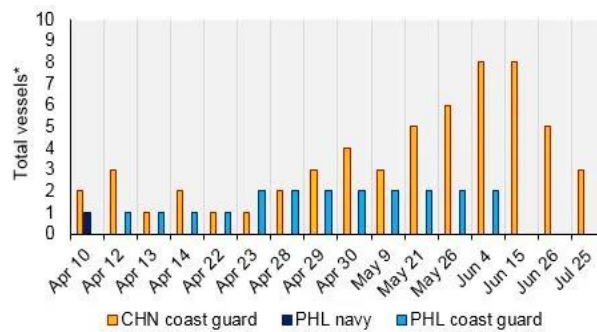
Sekuritisasi Wilayah Maritim dan Destabilisasi Keamanan Nelayan Filipina

Scarborough Shoal merupakan sebuah atol karang yang terletak sekitar 220 km di sebelah barat pulau Luzon, Filipina, dan masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Atol karang ini juga menjadi salah satu dari beberapa tempat yang termasuk ke dalam sengketa teritorial (Raikar, 2026). Konflik sengketa maritim berawal pada 8 April 2012, ketika Angkatan Laut Filipina mendapati kapal nelayan Tiongkok yang sedang berlabuh di area tersebut. Sebagai respons, Filipina mengerahkan kapal fregat terbesarnya untuk menghentikan kegiatan yang diidentifikasi sebagai praktik penangkapan ikan ilegal.

Pasca insiden tersebut, terjadi kebuntuan panjang selama beberapa minggu, yang melibatkan kehadiran kapal penjaga secara intensif dan melarang nelayan Filipina mendekati

area laguna. Upaya diplomasi, termasuk inisiatif pengurangan kehadiran militer Filipina gagal dilakukan akibat perbedaan tuntutan penarikan kapal oleh Tiongkok. Ketegangan semakin meningkat ketika kapal patroli Tiongkok terus bertambah dan mengganggu aktivitas kapal-kapal Filipina. Hingga pada 30 April, Filipina dan AS mengadakan pertemuan bilateral yang menegaskan komitmen kerja sama pertahanan dan peningkatan kapasitas maritim Filipina (Green & et. al., 2017).

Dinamika awal konflik tersebut memperlihatkan bahwa sengketa maritim tidak lagi sekadar persoalan batas wilayah, tetapi telah berkembang menjadi ruang kontestasi antaraktor negara. Kehadiran kapal penjaga, pengerahan kekuatan maritim, serta penguatan kerja sama pertahanan menunjukkan adanya proses sekuritisasi wilayah yang menjadikan laut sebagai ruang pertahanan dan proyeksi kekuatan negara.



Gambar 2. Pergeseran Kekuatan Maritim di Scarborough Shoal Tahun 2012 (Sumber: (Green & et. al., 2017))

Perjalanan modernisasi alutsista Filipina terbagi ke dalam tiga fase melalui Program Horizon, program yang dirancang Filipina untuk meningkatkan pertahanan teritorial luar. Horizon satu (2013-2017) memulai aksi dengan mengakuisisi 12 jet tempur FA-50 buatan Korea Selatan dan kapal patroli bekas dari AS. Horizon dua (2018-2022), yang dimulai pada era Presiden Rodrigo Duterte, mendatangkan alutsista canggih, termasuk dua fregat kelas Incheon (BRP *Jose Rizal* dan BRP *Antonio Luna*), sistem pertahanan udara SPYDER dari Israel, serta rudal jelajah BrahMos dari India senilai \$375 juta USD.

Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Marcos Jr., Filipina berupaya mengoptimalkan fase Horizon tiga (2023-2028) yang memprioritaskan kekuatan angkatan laut dan udara, dengan fokus pengadaan jet tempur, kapal selam, dan sistem radar siber guna memproyeksikan kekuatan di ZEE Filipina (International Crisis Group, 2025). Transisi kepemimpinan ke era Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (2022-2028) menjadi titik balik penguatan aliansi strategis Filipina dan AS dalam mengupayakan kepentingan keamanan nasional. Presiden Marcos Jr. menghidupkan kembali kerja sama militer yang sempat memudar

di periode pemerintahan sebelumnya. Komitmen aliansi ini diwujudkan melalui forum *11th Philippines-United States Bilateral Strategic Dialogue*, di mana Filipina dan AS sepakat untuk mempercepat pengembangan kapasitas militer dan memperluas operasi maritim bersama di bawah *Mutual Defense Treaty* 1951. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah aktivasi kembali *Enhanced Defence Cooperation Agreement* dengan penambahan empat lokasi pangkalan militer baru, yakni Bandara Lal-Lo, Pangkalan Angkatan Laut Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, dan Pulau Balabac.

Selain penguatan infrastruktur, AS juga memberikan investasi sebesar \$128 juta USD, dan pada Juli 2024, AS memberikan bantuan lagi sebesar \$500 juta USD melalui program *Foreign Military Financing* untuk modernisasi alutsista Filipina. Di sisi lain, Filipina telah menerapkan kebijakan *measured transparency* sejak tahun 2023 untuk mengungkap taktik zona abu-abu Tiongkok di wilayah maritim mereka, yang juga turut didukung oleh intelijen dan pengawasan maritim AS (Simanjuntak, 2024, hal. 2, 5-6, 8-9).

Penguatan kapasitas dan aliansi pertahanan tersebut memperlihatkan bagaimana konflik ini dikonstruksi sebagai ancaman strategis yang membutuhkan respons keamanan berbasis militer. Di sisi lain, peningkatan modernisasi alutsista dan proyeksi kekuatan maritim turut memperbesar intensitas rivalitas keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik keamanan negara tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling mempengaruhi dan menghasilkan eskalasi tindakan keamanan yang berulang. Di waktu yang bersamaan, tindakan ini perlahan mempersempit ruang keamanan manusia, karena masyarakat sipil yang hidup di sekitar wilayah sengketa justru berada pada posisi paling rentan terhadap eskalasi konflik.

Dalam tiga tahun terakhir, ketegangan maritim ini sangat berdampak pada kelangsungan nelayan lokal di Filipina diakibatkan tindakan koersif di kawasan laut. Pada September 2023, pasukan penjaga pantai Tiongkok memasang alat peranti terapung sepanjang 300 meter di Scarborough Shoal, yang mengakibatkan terhambatnya akses bagi 50 kapal Filipina yang akan berlabuh di area tersebut. Tindakan ini ilegal dan dikecam keras oleh otoritas keamanan nasional Filipina, karena dianggap telah melanggar hak penangkapan ikan nelayan lokal. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para nelayan, Filipina menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas dalam menyingkirkan hambatan tersebut (Deutsche Welle, 2023).

Pada Desember 2025, kapal penjaga pantai Tiongkok melakukan tindakan agresif terhadap 20 kapal nelayan Filipina di perairan Sabina Shoal. Aksi ini melibatkan penggunaan meriam air bertekanan tinggi dan manuver penghalangan yang berbahaya. Selain itu, personel Tiongkok diduga sengaja memutus tali jangkar kapal nelayan dan membiarkan mereka

terombang-ambing di tengah arus dan gelombang tinggi. Insiden tersebut mengakibatkan tiga nelayan Filipina terluka dan dua kapal mengalami kerusakan serius. Menanggapi kasus ini, Filipina mendesak Tiongkok untuk mematuhi standar internasional dan mengutamakan keselamatan awak kapal. Namun, pihak Tiongkok diketahui berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan upayanya untuk mempertahankan kedaulatan teritorial atas *Tiongkok Xianbin Jiao* (Sabina Shoal) atau wilayah yang mereka klaim secara sepihak (Amar & Adhi, 2025).

Seluruh dinamika tersebut menunjukkan bahwa wilayah tangkap tradisional nelayan lokal telah mengalami proses sekuritisasi, di mana ruang laut yang sebelumnya berfungsi sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir bergeser menjadi ruang strategis yang diperebutkan dalam kepentingan keamanan negara. Akibatnya, aktivitas melaut yang sebelumnya bersifat rutin berubah menjadi aktivitas berisiko tinggi yang dipenuhi ketidakpastian, pengawasan, dan ancaman koersif, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian isu keamanan nasional. Dalam situasi tersebut, keamanan lebih banyak dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepentingan geopolitik saja, karena upaya negara untuk mempertahankan stabilitas kawasan justru menghasilkan kerentanan pada level manusia.

Selain mengancam keselamatan fisik akibat serangkaian tindakan koersif di laut, para nelayan juga akan dihadapi oleh situasi ketidakpastian dalam menjalankan aktivitas melaut sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, nelayan berisiko kehilangan akses wilayah tangkap utama mereka, serta dihantui oleh tekanan psikologis berupa rasa takut dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konflik Laut Tiongkok Selatan bukan hanya persoalan geopolitik antarnegara, tetapi juga membentuk insecurities personal terhadap komunitas nelayan yang hidup di kawasan sengketa.

Pembatasan Akses Laut dan Kerentanan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Fokus negara pada keamanan teritorial seringkali memicu ketidakpastian sektor ekonomi bagi masyarakat yang kelangsungan hidupnya bergantung pada sumber daya alam di area sengketa. Filipina sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 7.600 pulau, masyarakatnya bergantung pada sektor perikanan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari segi geografis, sebagian besar penduduk Filipina terkonsentrasi di wilayah pesisir, di mana pada tahun 2023 tercatat lebih dari 85% atau 2,29 juta nelayan skala kecil menggantungkan pemenuhan pangan mereka pada wilayah ini (SEAFDEC, 2022).

Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan produktivitas perikanan yang tinggi, yang mencakup berbagai spesies komersial penting, serta menjadi lokasi operasional bagi lebih dari separuh kapal penangkap ikan di dunia. Namun, potensi ini telah dipengaruhi oleh dinamika konflik, di mana negara-negara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam juga terlibat

dalam konfrontasi dengan Tiongkok terkait akses ke area penangkapan ikan. Data analisis risiko ekonomi regional pada gambar ke-3 menunjukkan bahwa Filipina berada pada level risiko menengah-tinggi dengan skor 8,25 pada kategori risiko ekonomi dalam sengketa perbatasan maritim. Kondisi ini diperburuk oleh aktivitas kapal-kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal sekaligus patroli agresif di sekitar kepulauan Spratly.

	Low Risk 1 - 2.5	Medium Risk 2.51 - 5	Medium-High Risk 5.01 - 7.5	High Risk 7.51 - 10		
Indicators	Cambodia	Indonesia	Malaysia	Philippines	Thailand	Vietnam
Economic	N/A	6.71	5.56	6.96	5.46	5.73
% of Population Employed in Fisheries	N/A	7.00	5.40	7.80	5.80	6.40
Household Economic Dependence on Fishing in Coastal Communities	N/A	7.60	6.07	8.40	5.60	6.40
% of National Fisheries that are Artisanal	N/A	6.87	6.13	7.30	5.93	6.30
Coastal Poverty Rate	N/A	6.40	5.60	7.10	5.13	4.86
Fisheries Infrastructure	N/A	5.20	4.20	4.20	4.67	5.03

Gambar 3. Skor Risiko Ekonomi Negara-Negara Asia Tenggara di Laut Tiongkok Selatan Tahun 2023 (Sumber: (MacMurray & et. al., 2025, hal. 7))

Tentu, dengan adanya pembatasan akses ke wilayah tangkap tradisional menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nelayan. Laut yang selama ini menjadi ruang mata pencaharian mereka perlahan berubah menjadi ruang terbatas yang dipenuhi pengawasan dan kontrol keamanan negara. Oleh sebab itu, ketika akses ini terganggu akibat konflik geopolitik, dampaknya tidak hanya dirasakan negara sebagai kerugian berskala makro, tapi juga mempengaruhi ekonomi mikro kelompok masyarakat.

Berdasarkan data dari (Conde, 2024), tiga wilayah strategis yang berada di Laut Filipina Barat, yakni wilayah Ibu Kota Nasional, MIMAROPA (termasuk Palawan) dan Luzon Tengah (termasuk Zambales), menunjukkan tren deplesi nilai produksi ikan selama dua dekade terakhir. Pada periode 2002-2011, akumulasi kontribusi ekonomi terhadap perekonomian nasional dari wilayah-wilayah ini mencapai \$1,45 miliar. Namun pada dekade berikutnya, angka ini turun sebesar 11% menjadi \$1,27 miliar. Data ini mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap pertumbuhan ekonomi Filipina di sektor perikanan.

Lebih spesifik lagi, aliansi nelayan nasional Filipina, Pamakalaya, mencatat bahwa kelompok nelayan yang melaut di area Scarborough Shoal dan sebagian Laut Filipina Barat mengalami penurunan pendapatan hingga 60% sejak adanya pembatasan penangkapan ikan oleh Tiongkok di kawasan tersebut. Pendapatan nelayan yang sebelumnya dapat mencapai ₱8.000–₱10.000 (\$132–\$165) setiap kali melaut dalam seminggu menurun drastis menjadi sekitar ₱2.000–₱4.000 (Rita, 2024). Dampak ekonomi tersebut turut dirasakan oleh masyarakat

pesisir di Zambales, salah satu pusat perikanan utama Filipina yang berada di pesisir barat Luzon. Dalam satu dekade terakhir, hasil tangkapan ikan di wilayah ini terus mengalami penurunan, sehingga membuat banyak nelayan masuk ke dalam kondisi utang berkepanjangan.

Keterbatasan akses terhadap wilayah tangkap tradisional membuat nelayan harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar untuk melaut, termasuk biaya bahan bakar dan penyimpanan ikan. Beberapa nelayan mengaku harus mengeluarkan hingga ₱60.000 untuk solar dan sekitar ₱25.000–₱30.000 untuk es dalam satu kali pelayaran, meskipun hasil tangkapan yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya tersebut (Ramos, 2023). Krisis ekonomi ini juga berkaitan dengan praktik penangkapan ikan ilegal. Studi *Overseas Development Institute* (ODI) tahun 2024 mengidentifikasi terdapat setidaknya 77 kapal berbendera Tiongkok yang beroperasi di wilayah tersebut, di mana mereka terlibat dalam aktivitas penangkapan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) (Ramos, 2023).

Konflik Laut Tiongkok Selatan tidak hanya membatasi ruang gerak nelayan, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan ekonomi mereka. Laut yang mereka kenal sebagai sumber penghidupan ekonomi perlahan berubah fungsi. Akibatnya, masyarakat nelayan harus menghadapi ketidakpastian pendapatan di tengah tingginya ketergantungan ekonomi mereka terhadap sektor perikanan. Di tengah kondisi tersebut, nelayan Filipina selalu berupaya menuntut perlindungan yang lebih besar kepada pemerintah. Pada tahun 2020, lebih dari 1.000 nelayan di Zambales dan wilayah sekitarnya membentuk Federasi Nelayan Bigkis sebagai respons terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi mereka. Kelompok nelayan tersebut mendesak pemerintah Filipina untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam melindungi hak penangkapan ikan nelayan lokal, termasuk memperkuat kehadiran penjaga pantai khusus di Scarborough Shoal, dan menyediakan alternatif mata pencaharian bagi nelayan yang terdampak (Conde, 2024).

Dalam konteks ini, ancaman keamanan bukan hanya sekadar ancaman militer, tetapi juga mencakup terganggunya kemampuan masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan ekonomi. Keamanan ekonomi tidak hanya berkaitan tentang kemampuan memperoleh pendapatan, melainkan juga kepastian akses terhadap sumber mata pencaharian utama. Bagi komunitas pesisir Filipina, laut merupakan fondasi utama ekonomi sehari-hari mereka. Namun, adanya pembatasan wilayah tangkap dan praktik penangkapan ilegal menyebabkan penurunan pendapatan, naiknya biaya operasional, serta penurunan produktivitas hasil melaut, menunjukkan situasi kerentanan ekonomi yang semakin mengkhawatirkan kondisi masyarakat pesisir.

Critical security studies memandang keamanan tidak semata-mata berorientasi pada perlindungan negara, tetapi juga pada keberlangsungan hidup manusia. Rivalitas geopolitik membuat masyarakat nelayan menjadi kelompok paling rentan, karena mereka berada pada posisi yang sangat bergantung terhadap akses wilayah tangkap, namun memiliki kapasitas terbatas untuk menghadapi situasi konflik. Tanpa adanya jaminan terhadap akses mata pencaharian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, maka keamanan nasional hanya akan berorientasi pada stabilitas negara, tetapi belum sepenuhnya menjangkau dimensi kesejahteraan manusia.

Ancaman Degradasi Lingkungan Laut terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir

Sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan bukan hanya berkaitan tentang persaingan atau klaim kedaulatan antarnegara, tetapi juga mencakup persoalan lingkungan. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa konflik ini telah bertransformasi menjadi ancaman ekosistem dan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Contoh yang paling nyata adalah hancurnya ribuan hektar terumbu karang di wilayah Scarborough Shoal (Asia Maritime Transparency Initiative, 2025) yang selama ini menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati maritim. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik maritim secara langsung turut mengubah keseimbangan ekologis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat pesisir.

Dikutip dari (Magang Alam LindungiHutan, 2022), degradasi lingkungan merupakan “kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya.” Hal ini dialami oleh Filipina, dan tidak hanya mengganggu keseimbangan ekologis, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alamnya dalam jangka panjang. Degradasi lingkungan bukan hanya sekadar isu ekologi, melainkan bentuk ancaman nirmiliter, sekaligus konsekuensi bencana yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Bagi komunitas pesisir Filipina, laut bukan hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai sumber utama pemenuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika kualitas lingkungan laut terus mengalami penurunan, maka ancaman yang muncul bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan juga keberlangsungan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dasar mereka. Dampak buruknya dapat memicu krisis ketahanan pangan bagi masyarakat lokal yang kelangsungan hidupnya bertumpu pada ekosistem laut tersebut.

Pada tahun 2015, pemerintah Filipina menyatakan bahwa proyek reklamasi di tujuh terumbu karang yang berada di Kepulauan Spratly, telah merusak ratusan hektar terumbu karang yang menjadi habitat utama berbagai spesies laut, dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai \$100 juta USD per tahun. Juru bicara pertahanan nasional Filipina bahkan menilai proyek reklamasi itu akan mempengaruhi keamanan wilayah dalam tiga hingga empat tahun mendatang (Orendain, 2015). Kerusakan lingkungan semakin meningkat saat mengetahui pembangunan pulau buatan Tiongkok digunakan untuk mendukung kepentingan militernya. Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016 mengecam keras tindakan Tiongkok atas penghancuran lebih dari 100 km² terumbu karang alami akibat pengerukan laut dan pembangunan fasilitas buatan di tujuh titik Kepulauan Spratly. Dikutip dari (Tickell, 2016), Tiongkok "telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 192 dan 194 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut untuk melestarikan dan melindungi lingkungan laut sehubungan dengan ekosistem yang rapuh dan habitat spesies yang menipis, terancam, atau hampir punah."

Laut Tiongkok Selatan diketahui menopang kehidupan lebih dari 300.000 nelayan Filipina dan menyediakan sekitar sepertiga produksi ikan nasional (Conde, 2024). Namun, laporan dari Oceana menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dampak degradasi lingkungan semakin terlihat melalui penurunan populasi berbagai spesies komoditas laut utama akibat praktik penangkapan ilegal dan eksploitasi berlebihan. Oceana juga pernah mencatat sekitar 87% stok ikan laut Filipina berada dalam status kondisi tangkap berlebihan pada tahun 2017 (Dao, 2025). Data penurunan stok ikan tersebut merupakan perwujudan dari degradasi lingkungan laut, di mana ketika populasi ikan terus menurun, masyarakat nelayan akan semakin sulit memperoleh hasil tangkapan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun distribusi pangan lokal.

Baru-baru ini, pada tahun 2025, militer Filipina menemukan indikasi penggunaan sianida oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok di sekitar Ayungin Shoal, wilayah ZEE Filipina. Juru Bicara Angkatan Laut Filipina menyatakan bahwa pihaknya telah menyita sepuluh botol sianida dari sejumlah sampan nelayan Tiongkok dalam beberapa operasi sepanjang tahun (Christiastuti, 2026). Dugaan tersebut semakin menguat ketika pada Maret 2026 lalu, awak kapal Tiongkok kembali terlihat membuang zat kimia ke laut dan hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya kandungan natrium sianida dalam kadar berbahaya di perairan tersebut (Sajati, 2026). Pemerintah Filipina menilai tindakan ini bukan sekadar pelanggaran lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan sumber daya pangan laut. Asisten Direktur Dewan Keamanan Nasional Filipina, Cornelio Valencia Jr., menyebut bahwa

“penggunaan sianida di Ayungin Shoal adalah bentuk sabotase untuk mematikan populasi ikan setempat” (Sijati, 2026). Selain membunuh ikan, zat sianida juga berpotensi menghancurkan terumbu karang, mencemari rantai makanan laut, hingga mengancam nyawa manusia (Sijati, 2026).

Kawasan Laut Filipina Barat telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan pangan nasional. Pada tahun 2024, para ilmuwan melaporkan bahwa produksi ikan nasional mengalami penurunan hingga 60%–80% di tengah meningkatnya tekanan konflik di Laut Filipina Barat. Berdasarkan laporan dari Direktur Institut Ilmu Kelautan UP Diliman, Dr. Laura David (Mendoza, 2024), dalam dua dekade terakhir, jumlah famili ikan di Laut Filipina Barat menurun drastis dari 34 menjadi hanya 22 spesies utama saja. Situasi ini semakin kompleks akibat adanya hambatan dalam kegiatan riset di Laut Filipina Barat. Upaya penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti mengalami gangguan oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, tepat ketika mereka ingin melakukan penilaian terhadap potensi sumber daya perikanan di wilayah tersebut (Mendoza, 2024). Akibatnya, proses identifikasi lingkungan menjadi semakin sulit dilakukan di tengah rivalitas geopolitik.

Secara tidak langsung, aktivitas yang menyebabkan degradasi lingkungan laut tersebut semakin mempercepat kerusakan ekologis di kawasan sengketa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan fungsi lingkungan secara signifikan. Laut tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai ruang kehidupan masyarakat, tetapi menjadi ruang konflik yang rentan oleh eksploitasi alam. Situasi ini mempengaruhi rantai pasokan pangan masyarakat pesisir, di mana masyarakat akan kehilangan jaminan ketersediaan sumber protein yang stabil dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, generasi mendatang akan sangat rentan terhadap krisis pangan laut.

Perspektif *critical security studies* memperluas pemahaman mengenai ancaman keamanan, dan menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian penting dari isu keamanan kontemporer. Jadi, keamanan disini tidak hanya diukur dari sejauh mana kemampuan negara dapat mempertahankan wilayah, namun juga sejauh mana masyarakat mampu mempertahankan akses terhadap sumber pangan dan lingkungan hidup yang layak. Pada dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan, praktik keamanan dan rivalitas geopolitik antaraktor negara justru menghasilkan konsekuensi ekologis yang lebih besar. Kepentingan strategis negara cenderung lebih diprioritaskan dibanding keberlanjutan ekosistem laut. Oleh sebab itu, krisis pangan yang muncul adalah bentuk konsekuensi akibat tindakan sekuritisasi negara di kawasan sengketa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik di Laut Tiongkok Selatan menunjukkan bahwa sengketa maritim tidak lagi hanya berkaitan soal kepentingan geopolitik antarnegara, tetapi juga menghasilkan implikasi langsung terhadap keamanan manusia. Serangkaian proses sekuritisasi wilayah yang dilakukan di kawasan sengketa telah mengalihfungsikan laut menjadi area dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi bagi masyarakat sipil. Dalam kondisi ini, masyarakat pesisir, khususnya nelayan menjadi kelompok yang paling rentan dalam aktivitas melaut sehari-hari.

Di sisi lain, konflik berkepanjangan turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat akibat menyempitnya ruang mata pencaharian. Pembatasan akses laut, praktik penangkapan ilegal, serta menurunnya hasil tangkapan menunjukkan bahwa konflik maritim ini menciptakan insecurities ekonomi bagi komunitas nelayan. Selain itu, degradasi lingkungan laut juga memperlihatkan ancaman serius terhadap keberlanjutan pangan masyarakat pesisir Filipina. Kerusakan ekosistem laut menyebabkan menurunnya populasi ikan dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menopang kebutuhan pangan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.

Melalui lensa *critical security studies*, praktik keamanan yang berorientasi pada negara justru dapat menghasilkan bentuk-bentuk kerentanan baru pada level manusia. Fokus negara terhadap perlindungan kedaulatan dan kontrol wilayah cenderung menempatkan masyarakat sipil sebagai kelompok sekunder yang menerima konsekuensi dari rivalitas geopolitik. Pada penelitian ini, konsekuensi tersebut menciptakan insecurities pada dimensi personal, ekonomi, dan pangan masyarakat pesisir di Filipina.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah Filipina untuk meningkatkan upaya perlindungan agar lebih inklusif terhadap aspek keamanan manusia, dalam hal ini, komunitas masyarakat pesisir, guna mengatasi dampak negatif insecurities akibat konflik wilayah. Demikian, keamanan seharusnya tidak dipahami sebatas perlindungan teritorial negara saja, melainkan juga sebagai upaya menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan kebebasan masyarakat dari berbagai bentuk kerentanan akibat konflik.

DAFTAR REFERENSI

- Adhi, I. S. (2021, December 4). Apa itu nine dash line yang sering dipakai China untuk klaim Natuna? Kompas.com. <https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/apa-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna-?page=all>
- Amar, M. I., & Adhi, I. S. (2025, December 14). Filipina-China memanas di Laut China Selatan, nelayan sampai terluka. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/14/100000065/filipina-china-memanas-di-laut-china-selatan-nelayan-sampai-terluka?page=all>
- Apriliani, D., & Rahmat, T. (2023). Keamanan manusia dalam perspektif studi keamanan kritis (Critical Security Studies): Studi kasus peranan ASEAN Political-Security Community (APSC) dalam pemberantasan human trafficking. *Global Mind: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.53675/jgm.v5i1.1065>
- Arihito, B. (2017). Pengaruh kepemimpinan Presiden Duterte terhadap hubungan bilateral Filipina dengan Cina. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2025, September 18). China's nature reserve at Scarborough—More than a decade too late. <https://amti.csis.org/chinas-nature-reserve-at-scarborough-more-than-a-decade-too-late/>
- Christiastuti, N. (2026, April 13). Filipina tuduh nelayan China racuni perairan sengketa Laut China Selatan. *DetikNews*. <https://news.detik.com/internasional/d-8442057/filipina-tuduh-nelayan-china-racuni-perairan-sengketa-laut-china-selatan>
- Conde, M. (2024, November 28). A fight for food and sovereignty: How the South China Sea crisis impacts Filipino fishermen. *China Global South Project*. <https://chinaglobalsouth.com/analysis/a-fight-for-food-and-sovereignty-how-the-south-china-sea-crisis-impacts-filipino-fishermen/>
- Damping, G., & Windiani, R. (2020). Perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap China di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte dalam konflik Laut China Selatan. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*.
- Dao, T. (2025, August 6). Years of illegal fishing, overexploitation are ravaging Philippine fish stocks, Oceana reports. *SeafoodSource*. <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/years-of-illegal-fishing-overexploitation-are-ravaging-philippine-fish-stocks-oceana-reports>
- Dawam, M. N., & Fatwa, A. F. (2025). Dinamika penyelesaian perselisihan internasional: Studi kasus Laut China Selatan. *Maleo Law Journal*.
- Deutsche Welle. (2023, September 25). Filipina dan Cina kembali bersitegang di Laut Cina Selatan. *DW*. <https://www.dw.com/id/filipina-dan-cina-kembali-bersitegang-di-laut-cina-selatan/a-66916876>
- Green, M., et al. (2017, May 22). Counter-coercion series: Scarborough Shoal standoff. *Asia Maritime Transparency Initiative*. <https://amti.csis.org/counter-co-scarborough-standoff/>
- Hidayat, A. R., et al. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis realis terhadap perebutan kekuasaan, respon regional, dan implikasi geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>
- Hidayat, R. A. (2017). Keamanan manusia dalam perspektif studi keamanan kritis terkait perang intra-negara. *Intermestic: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.3>

- International Crisis Group. (2025). Riding unruly waves: The Philippines' military modernisation effort. International Crisis Group.
- Jahangir, S. (2020, June 25). The strategic importance of the South China Sea. WGI World Geostrategic Insights. <https://www.wgi.world/the-strategic-importance-of-the-south-china-sea/>
- Jennings, R. (2017, April 4). Nelayan Filipina keluhkan hasil tangkapan turun di Laut China Selatan. Voice of America Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/nelayan-filipina-kesulitan-peroleh-hasil-tangkapan-di-kawasan-laut-china-selatan/3795388.html>
- Khairunnisa, A. A., & Burhanuddin, A. (2025). Militerisasi pulau buatan di Laut China Selatan oleh Tiongkok: Implikasi terhadap keamanan maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.988>
- Kusuma, A. S. (2021). Human security dalam hubungan internasional: Sebuah pengantar. Pustaka Ilmu.
- MacMurray, M., et al. (2025). IUU fishing risk profile for the South China Sea. Stimson Center.
- Magang Alam LindungiHutan. (2022, September 8). Degradasi lingkungan: Pengertian, penyebab, dampak, bentuk, dan cara mengatasinya. LindungiHutan. <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-degradasi-lingkungan/>
- Maulana, V. (2016, September 7). Nine dash line China di LCS tak punya dasar hukum. SindoNews. <https://international.sindonews.com/berita/1137570/40/nine-dash-line-china-di-lcs-tak-punya-dasar-hukum>
- Mendoza, J. E. (2024, May 30). Fish production in PH down 60–80% amid West Philippine Sea issue, overfishing. INQUIRER.net. <https://globalnation.inquirer.net/238145/ fisheries-production-in-ph-down-by-60-80-amid-west-ph-sea-tensions>
- Moranta, A. R., & Ras, A. R. (2022). Dinamika Laut Cina Selatan dalam perspektif realisme dunia internasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Nurcahyana, et al. (2025). Respon Filipina dan Malaysia terhadap klaim Tiongkok di Laut China Selatan tahun 2013–2020. *Global Insight Journal (Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional)*.
- Orendain, S. (2015, April 14). Filipina: Reklamasi China di Laut China Selatan rugikan kawasan. Voice of America Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/filipina-kecam-reklamasi-china/2718089.html>
- Raikar, S. P. (2026, May 5). Scarborough Shoal. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Scarborough-Shoal>
- Ramos, M. (2023, December 8). Filipino fishermen caught in debt net in South China Sea row. Thomson Reuters Foundation.
- Rita, J. (2024, July 17). PAMALAKAYA: Scarborough fishers' income down 60% amid China's fishing ban. GMA News Online. <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/regions/913627/pamalakaya-scarborough-fishers-income-down-60-amid-china-s-fishing-ban/story/>
- Sajati, S. S. (2026, April 14). Filipina tuduh kapal China gunakan sianida di Laut China Selatan. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/world/filipina-tuduh-kapal-china-gunakan-sianida-di-laut-china-selatan-c1c2-01-nz139-dcvgr>

- SEAFDEC. (2022, September 7). Fisheries country profile: Philippines. Southeast Asian Fisheries Development Center. <https://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-philippines/>
- Simanjuntak, E. S. (2024). Peningkatan kerja sama militer Filipina dengan AS sebagai tindakan rasional Marcos Jr. *Jurnal Transborders*. <https://doi.org/10.23969/transborders.v8i1.19608>
- Susanti, C. (2025, September 3). Analisis dampak konflik di Laut China Selatan terhadap pertahanan negara ditinjau dari perspektif Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/pothan/2025/09/03/analisis-dampak-konflik-di-laut-china-selatan-terhadap-pertahanan-negara-ditinjau-dari-perspektif-direktorat-jenderal-potensi-pertahanan.html>
- Tickell, O. (2016, July 12). China condemned for massive coral reef destruction. *The Ecologist*.
- Wahyuni, Y. S. (2021). Keamanan individu (personal security) dan qanun hukum keluarga: Tinjauan konsep keamanan manusia (human security). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*.
- Wiesner, C. (2022). Doing qualitative and interpretative research: Reflecting principles and principled challenges. *Political Research Exchange*. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2022.2127372>
- Zebua, R. M., & Shiddiqy, M. A. (2025). Peran Amerika Serikat terhadap Filipina dalam konflik Laut Cina Selatan pasca putusan PCA (Permanent Court of Arbitration). *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22680](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22680)